

**PENILAIAN EFEKTIVITAS
STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMBERIAN KREDIT
PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) KABUPATEN
GIANYAR**

Komang Krishna Yogantara¹⁾

Gde Herry Sugiarto Asana²⁾

I Putu Agus Suarsana Ariesta³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya

ABSTRACT

LPD is a financial institution whose main activity is to extend credit. In this connection, the management function is the supervision of credit through the internal control structure in the granting of credit is required. This study tried to assess the effectiveness of the internal control structure in the provision of credit to the Village Credit Institutions (LPD) Gianyar regency. Variables used in this study is the control environment, accounting systems, and control procedures. Data were obtained through a questionnaire submitted to each respondent. The analysis technique used is the technique of quantitative analysis using Likert scale. Based on the analysis that has been done on the effectiveness of the internal control structure in lending in Gianyar stated that the assessment of the effectiveness of the internal control structure in lending included in the criteria is very effective.

Keywords: control environment, accounting systems, and control procedures, quantitative analysis

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini mendorong semangat setiap daerah untuk lebih dapat meningkatkan ekonomi dan pengembangan usaha di pedesaan, khususnya dalam membantu penyediaan dana untuk masing-masing usaha yang ada di pedesaan. Begitu pula halnya dengan daerah Bali yang memiliki adat dan budaya hindu. Ciri khas desa adat adalah unsur Tri Hita Karana yaitu Parahyangan, Pawongan dan Palemahan yang merupakan sebuah kesatuan utuh dan tidak dipisahkan. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, desa di Bali juga mempunyai fungsi menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk

kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa keberadaan desa adat memiliki hak otonom dalam bidang sosial ekonomi.

Mengingat peranan dan kontribusi desa adat ke arah usaha ekonomi produktif, maka berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tertanggal 1 November 1984 dibentuk suatu lembaga keuangan yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di daerah Bali yang dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan dalam memecahkan masalah kelangkaan permodalan dan mobilitas dana masyarakat untuk dikembangkan guna meningkatkan usaha golongan ekonomi lemah yang banyak terdapat di pedesaan.

Dalam skala mikro, dengan manajemen yang sederhana serta *equipment* yang masih terbatas (sumber daya manusia dan infrastruktur) maka LPD perlu melaksanakan pembenahan dalam artian perlu menata ulang manajemennya termasuk unsur yang lain seperti struktur pengendalian intern menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan LPD sebagai lembaga profesional yang melayani golongan ekonomi lemah sebagai sasaran utama dalam pendistribusian dana atau kebutuhan masyarakat akan dana.

Penerapan dari struktur pengendalian intern ini diharapkan untuk mengamankan aktiva perusahaan, memberikan keyakinan pada pihak manajemen bahwa jasa yang dilaporkan bawahannya itu benar dan dapat dipercaya serta mendorong adanya efisiensi dan memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan semestinya. Karena begitu pentingnya peran struktur pengendalian intern dalam suatu perusahaan dan agar pengendalian intern dapat berjalan secara efektif, maka segala aspek yang berkaitan dengan pengendalian intern setiap saat perlu dinilai kembali.

Kabupaten Gianyar merupakan suatu daerah yang masih menjadikan LPD sebagai suatu badan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah LPD yang ada di Kabupaten Gianyar berjumlah 266 LPD. Dari 266 LPD di Kabupaten Gianyar sebanyak 66 LPD bermasalah, diduga bahwa Struktur Pengendalian Internnya tidak berfungsi dengan baik mengingat pengawasan terhadap operasional LPD masih kurang dan masih terjadi

perangkapan tugas dari masing-masing bagian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah "Apakah struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar sudah efektif?"

Tujuan Penelitian

untuk mengetahui efektivitas struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007, LPD adalah suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat dan merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan hidup krama desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, LPD terbentuk karena adanya prinsip otonomi daerah dimana Provinsi, Kabupaten, dan Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara dan berada di daerah kabupaten/kota.

Penggunaan atau pemanfaatan LPD ditujukan kepada unit-unit usaha baik yang menyangkut kepentingan desa maupun peningkatan taraf hidup warga desa yang bersangkutan. Jadi LPD merupakan suatu bidang usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh Desa Adat dalam rangka peningkatan taraf hidup krama/warga desa untuk menunjang pembangunan desa khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

b. Struktur Pengendalian Intern

Informasi yang dihasilkan dalam perusahaan membutuhkan suatu jaminan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan dan akurat, untuk itu diciptakan struktur pengendalian intern. Menurut Mulyadi (2002:45) struktur pengendalian intern adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Halim (2003:197) pengertian struktur pengendalian intern yang mencakup dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada SA 319 adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan.
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi.
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Komponen-Komponen Struktur Pengendalian Intern

Halim (2003:204) memaparkan bahwa komponen-komponen struktur pengendalian intern terdiri dari:

- 1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menerapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- 2) Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha dan untuk menyelenggarakan pertanggung jawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut.
- 3) Prosedur Pengendalian
Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang mempunyai beberapa tujuan yang ditetapkan pada berbagai tingkatan organisasi dan pemrosesan data.

d. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Menurut Kasmir (2001:93) menyebutkan bahwa kata kredit berasal dari bahasa latin *creditum* yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Maka seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Kredit mengandung pengertian adanya suatu

kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang dapat memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Kasmir (2001:92) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak yang meminjamkan (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Martono (2004:51) kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

e. Kolektibilitas Kredit

Menurut Sigit dan Totok (2006:118) kolektibilitas kredit adalah semua aktiva dalam rupiah yang dimiliki lembaga keuangan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif. Adapun ketentuan kolektibilitas kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kolektibilitas lancar (*pass*)
- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*)
- 3) Kurang lancar (*substandard*)
- 4) Diragukan (*doubtful*)
- 5) Macet (*loss*)

f. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya walaupun dengan biaya yang lebih besar karena disini efektivitas hanya melihat apakah suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Bastian (2001:336) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi telah berjalan secara efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Landasan Empiris

Yuwika (2003) dengan judul "Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Fungsi Kredit dan Penagihan Piutang Pada PT Pangan Lestari Denpasar". Dilihat dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern fungsi kredit dan penagihan piutang pada PT. Pangan Lestari Denpasar belum sepenuhnya efektif, karena masih adanya perangkapan tugas pada bagian-bagian yang berkaitan dengan fungsi kredit dan penagihan piutang.

Ketut Lasni (2005) yaitu dengan judul "Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Pada Prosedur Pemberian Kredit Di PT. BPR Setya Adhi

Perdana Jimbaran Kuta Badung”. Penulis ingin mengetahui apakah struktur pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Setya Adhi Perdana sudah memadai atau tidak. Dilihat dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa struktur pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit dilihat dari unsur lingkungan pengendalian adalah sangat memadai, dari unsur sistem akuntansi adalah sangat memadai dan dari unsur prosedur pengendalian adalah memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh data struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar sudah efektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar yang berjumlah 266 Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dari 107 LPD yang ada di Kecamatan Sukawati, Blahbatuh dan Gianyar terdapat 11 LPD yang belum mengirim laporannya, sedangkan dari 159 LPD yang ada di Kecamatan Ubud, Tegallalang, Tampaksiring, dan Payangan terdapat 26 LPD yang tidak melapor (membawa laporannya) per 31 Desember 2013

Untuk menentukan jumlah sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling* yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. LPD yang dipilih dan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah LPD dengan kriteria sebagai berikut:

1) LPD di Kabupaten Gianyar yang menerbitkan laporan LPD Per 31 Desember 2013. Alasan dari penentuan kriteria ini adalah

laporan yang diperoleh oleh peneliti merupakan data terbaru tentang kondisi LPD yang meliputi tingkat penyaluran dan pengembalian kredit serta kondisi kesehatan LPD.

2) LPD di Kabupaten Gianyar yang menyalurkan dananya untuk kredit diatas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar). Alasan dari penentuan kriteria ini adalah LPD di Kabupaten Gianyar yang menyalurkan dananya di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar) pada umumnya memiliki tingkat kesehatan yang baik dengan nilai CAEL (*Capital, Asset, Earning, dan Liquidity*) di atas 90%.

Berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan, diperoleh jumlah LPD di Kabupaten Gianyar yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel yaitu 48 (empat puluh delapan) LPD.

Variabel yang dinilai dalam penilaian ini adalah efektivitas struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit, dimana dalam hal ini yang menjadi ukuran adalah unsur-unsur dari struktur pengendalian intern itu sendiri yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran dan tindakan dari pengelola atau pengawas LPD serta pihak lain yang berkaitan dengan struktur pengendalian kredit.

2) Sistem akuntansi

Adalah metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi kredit pada LPD untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan

kewajiban yang berkaitan dengan transaksi kredit.

- 3) Prosedur pengendalian
Adalah kebijakan dan prosedur perkreditan yang diciptakan oleh pihak manajemen LPD untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan dapat tercapai yang meliputi prosedur otorisasi yang semestinya atas transaksi kredit, pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan kredit yang memadai, pengamanan yang cukup atas penggunaan aktiva perusahaan dan pengecekan secara independen mengenai pelaksanaan dan penilaian yang semestinya.

Intrument penelitian untuk masing-masing variabel adalah koesioner dengan lima pilihan berskala Likert. Sebelum dilakukan analisis data, koesioner diuji coba terlebih dahulu untuk melihat tingkat validitas dan reliabelitas instrument. Tahap berikutnya adalah melakukan perhitungan berdasarkan varians dan standar deviasi. Berdasarkan jawaban dari responden, maka dapat ditentukan besarnya presentase rata-rata dari setiap unsur struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan prosedur perhitungan sebagai berikut:

- 1) Menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah yang mungkin dicapai dari kuisisioner yang diajukan.
Misal :
skor tertinggi yang mungkin dicapai = a
skor terendah yang mungkin dicapai = b

- 2) Menentukan besarnya range skor nilai berdasarkan seluruh total skor nilai tertinggi yang mungkin dicapai dengan total skor nilai terendah yang mungkin dicapai. Formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Range skor} = a - b \dots \dots \dots (1)$$

- 3) Menentukan besarnya interval nilai berdasarkan perbandingan antara range skor nilai dengan jumlah kriteria nilai yang diperlukan. Terdapat lima kriteria tersebut, antara lain:

- (a) Kriteria Sangat Efektif (KSE)
- (b) Kriteria Efektif (KE)
- (c) Kriteria Cukup Efektif (KCE)
- (d) Kriteria Kurang Efektif (KKE)
- (e) Kriteria Tidak Efektif (KTE)

Formulasi :

$$\text{interval nilai (c)} = \frac{a - b}{5} \dots \dots (2)$$

- 4) Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian berdasarkan total skor nilai yang diperoleh masing-masing unsur dengan formulasi sebagai berikut:

- (a) $b + 4c \leq KSE \leq a \dots \dots (3)$
- (b) $b + 3c \leq KE < b + 4c \dots \dots (4)$
- (c) $b + 2c \leq KCE < b + 3c \dots \dots (5)$
- (d) $b + c \leq KKE < b + 2c \dots \dots (6)$
- (e) $b \leq KTE < b + c \dots \dots (7)$

- 5) Menentukan persentase terhadap keseluruhan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner dan menentukan penilaian efektivitas Struktur Pengendalian Intern dalam pemberian kredit sebagai pengolah data dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah responden dengan kriteria tertentu}}{\text{Total jumlah responden}} \times 100\% \dots \dots (8)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Berdasarkan atas jawaban responden dilihat dari unsur lingkungan pengendalian:

$$c = \frac{a-b}{5}$$

Keterangan:

c = interval nilai.

a = skor tertinggi yang mungkin dicapai.

b = skor terendah yang mungkin dicapai.

5 = konstanta.

$$a = 5 \times 30 = 150$$

$$b = 1 \times 30 = 30$$

$$\begin{aligned} \text{Range skor} &= a-b \\ &= 150 - 30 \\ &= 120 \end{aligned}$$

$$c = \frac{120}{5}$$

$$c = 24$$

jika dimasukkan kedalam formulasi, maka rentang nilai untuk masing-masing kriteria adalah:

1) Kriteria Sangat Efektif (KSE)
 $= 126 \leq \text{KSE} \leq 150$

2) Kriteria Efektif (KE)
 $= 102 \leq \text{KE} < 125,9$

3) Kriteria Cukup Efektif (KCE)
 $= 78 \leq \text{KCE} < 101,9$

4) Kriteria Kurang Efektif (KKE)
 $= 54 \leq \text{KKE} < 77,9$

5) Kriteria Tidak Efektif (KTE)
 $= 30 \leq \text{KTE} < 53,9$

Persentase keseluruhan pernyataan:
= Jumlah responden dengan kriteria tertentu / Total jumlah responden \times 100%

$$\text{KSE} = \frac{36}{48} \times 100\% = 75\%$$

$$\text{KE} = \frac{10}{48} \times 100\% = 20,83\%$$

$$\text{KCE} = \frac{02}{48} \times 100\% = 4,16\%$$

Maka dapat diketahui sebesar 75% telah menerapkan struktur

pengendalian intern dengan sangat efektif, sebesar 20,83% telah menerapkan struktur pengendalian intern dengan efektif dan sebesar 4,16% menerapkan struktur pengendalian intern dengan cukup efektif.

b) Berdasarkan atas jawaban responden dilihat dari unsur sistem akuntansi:

$$c = \frac{a-b}{5}$$

Keterangan:

c = interval nilai.

a = skor tertinggi yang mungkin dicapai.

b = skor terendah yang mungkin dicapai.

5 = konstanta.

$$a = 5 \times 18 = 90$$

$$b = 1 \times 18 = 18$$

$$\begin{aligned} \text{Range skor} &= a-b \\ &= 90 - 18 \\ &= 72 \end{aligned}$$

$$c = \frac{72}{5}$$

$$c = 14,4$$

Jika dimasukkan kedalam formulasi, maka rentang nilai untuk masing-masing kriteria adalah:

1) Kriteria Sangat Efektif (KSE)
 $= 75,60 \leq \text{KSE} \leq 90$

2) Kriteria Efektif (KE)
 $= 61,20 \leq \text{KE} < 75,59$

3) Kriteria Cukup Efektif (KCE)
 $= 46,80 \leq \text{KCE} < 61,19$

4) Kriteria Kurang Efektif (KKE)
 $= 32,40 \leq \text{KKE} < 46,79$

5) Kriteria Tidak Efektif (KTE)
 $= 18 \leq \text{KTE} < 32,39$

Persentase keseluruhan pernyataan:
= Jumlah responden dengan kriteria tertentu / Total jumlah responden \times 100%

$$\text{KS} = \frac{48}{48}$$

$$KE = \frac{07}{48} \times 100\% = 14,58\%$$

Maka dapat diketahui sebesar 85,41% telah menerapkan struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan sangat efektif dan sebesar 14,58% telah menerapkan struktur pengendalian intern pemberian kredit dengan efektif.

3) Berdasarkan atas jawaban responden dilihat dari unsur sistem akuntansi:

$$c = \frac{a-b}{5}$$

Keterangan:

c = interval nilai.

a = skor tertinggi yang mungkin dicapai.

b = skor terendah yang mungkin dicapai.

5 = konstanta.

$$a = 5 \times 42 = 210$$

$$b = 1 \times 42 = 42$$

$$\begin{aligned} \text{Range skor} &= a-b \\ &= 210 - 42 \\ &= 168 \end{aligned}$$

$$c = \frac{168}{5}$$

$$c = 33,6$$

Jika dimasukkan kedalam formulasi, maka rentang nilai untuk masing-masing kriteria adalah:

$$1) \text{ Kriteria Sangat Efektif (KSE)} \\ = 176,40 \leq KSE \leq 210$$

$$2) \text{ Kriteria Efektif (KE)} \\ = 142,80 \leq KE < 176,39$$

$$3) \text{ Kriteria Cukup Efektif (KCE)} \\ = 109,20 \leq KCE < 142,79$$

$$4) \text{ Kriteria Kurang Efektif (KKE)} \\ = 75,60 \leq KKE < 109,19$$

$$5) \text{ Kriteria Tidak Efektif (KTE)} \\ = 42 \leq KTE < 75,59$$

Persentase keseluruhan pernyataan:

$$= \text{Jumlah responden dengan kriteria tertentu} / \text{Total jumlah responden} \times 100\%$$

$$KSE = \frac{44}{48} \times 100\% = 91,66\%$$

48

$$KE = \frac{03}{48} \times 100\% = 6,25\%$$

$$KCE = \frac{01}{48} \times 100\% = 2,08\%$$

Maka dapat diketahui sebesar 91,66% telah menerapkan struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan sangat efektif, sebesar 6,25% telah menerapkan struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan efektif, sebesar 2,08% telah menerapkan struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan cukup efektif.

4) Dalam Tabel 1 akan ditunjukkan jumlah keseluruhan skor nilai untuk semua kriteria dan ketiga unsur struktur pengendalian intern yang merupakan jawaban dari responden terhadap penilaian efektivitas struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit yang ditetapkan oleh LPD adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jawaban Responden Atas Penilaian Efektivitas Secara Total.

Total	Skor Nilai Total Setiap Variabel			Total Skor
	1	2	3	
LPD Kabupaten Gianyar	6462	4203	9764	20429

Keterangan :

1 = Variabel Lingkungan Pengendalian

2 = Variabel Sistem Akuntansi

3 = Variabel Prosedur Pengendalian

Berdasarkan atas jawaban responden dilihat dari unsur-unsur pengendalian intern tersebut, maka dapat ditentukan efektif atau tidaknya struktur pengendalian

intern dalam pemberian kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

$$c = \frac{a-b}{5}$$

Keterangan:

c = interval nilai.

a = skor tertinggi yang mungkin dicapai.

b = skor terendah yang mungkin dicapai.

5 = konstanta.

$$a = 5 \times 144 \times 30 = 21600$$

$$b = 1 \times 144 \times 30 = 4320$$

$$c = \frac{a-b}{5}$$

$$c = \frac{21600 - 4320}{5}$$

$$c = 3456$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian dapat ditentukan dengan formulasi sebagai berikut:

$$1) \text{ Kriteria Sangat Efektif (KSE)} \\ = b + 4c \leq \text{KSE} \leq a$$

$$2) \text{ Kriteria Efektif (KE)} = b + 3c \\ \leq \text{KE} < b + 4c$$

$$3) \text{ Kriteria Cukup Efektif (KCE)} \\ = b + 2c \leq \text{KCE} < b + 3c$$

$$4) \text{ Kriteria Kurang Efektif (KKE)} \\ = b + c \leq \text{KKE} < b + 2c$$

$$5) \text{ Kriteria Tidak Efektif (KTE)} \\ = b \leq \text{KTE} < b + c$$

Berdasarkan formulasi tersebut, maka rentang nilai untuk masing-masing kriteria adalah:

$$1) \text{ Kriteria Sangat Efektif (KSE)} \\ = 18144 \leq \text{KSE} \leq 21600$$

$$2) \text{ Kriteria Efektif (KE)} \\ = 14688 \leq \text{KE} < 18143,9$$

$$3) \text{ Kriteria Cukup Efektif (KCE)} \\ = 11232 \leq \text{KCE} < 14687,9$$

$$4) \text{ Kriteria Kurang Efektif (KKE)} \\ = 7776 \leq \text{KKE} < 11231,9$$

$$5) \text{ Kriteria Tidak Efektif (KTE)} \\ = 4320 \leq \text{KTE} < 7765,9$$

Dari Tabel 1 tersebut, maka total skor sebesar 20429 yang apabila dibandingkan dengan rentang nilai masing-masing kriteria, skor nilai tersebut termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE). Jadi penilaian efektivitas struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kabupaten Gianyar termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif.

SIMPULAN

1. Penilaian dari variabel lingkungan pengendalian dinyatakan 75% telah menerapkan struktur pengendalian intern dengan sangat efektif

2. Penilaian dari variabel sistem akuntansi dinyatakan 85,41% telah menerapkan struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan sangat efektif

3. Penilaian dari variabel prosedur pengendalian dinyatakan 91,66% telah menerapkan struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan sangat efektif,

4. Penilaian secara keseluruhan mengenai penilaian efektivitas struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada LPD Kabupaten Gianyar, total skor yang diperoleh adalah sebesar 20429, yang jika dibandingkan dengan rentang nilai masing-masing kriteria, skor nilai tersebut termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE) = 18144 ≤ KSE ≤ 21600.

Jadi berdasarkan simpulan tersebut, maka penilaian efektivitas struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten

Gianyar termasuk dalam Kriteria
Sangat Efektif (KSE).

Keuangan Lain. Edisi ke dua.
Jakarta: Selemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2003. *Auditing
(Dasar-Dasar Audit Laporan
Keuangan)*. Edisi Ketiga.
Yogyakarta. UPP AMP
YKPN.

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi
Sektor Publik di Indonesia*.
Yogyakarta: BPFE.

Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya*. Edisi ke
Enam Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor
Publik*. Yogyakarta: Penerbit
Andi Yogyakarta.

Martono. 2004. *Bank & Lembaga
Keuangan Lainnya*. Edisi
Keenam. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi
Keenam. Jakarta: Selemba
Empat.

Lasni, Ni Ketut. 2005. *Evaluasi
Sistem Pengndalian Intern
Pada Prosedur Pemberian
Kredit Di PT. BPR Satya Adhi
Perdana*. Skripsi Sarjana
Jurusan Akuntansi Falkultas
Ekonomi Program Ekstensi
Universitas Udayana.

Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3
Tahun 2007 yang mengatur
tentang Lembaga Perkreditan
Desa (LPD).

Sigit Triandaru & Totok Budisantoso.
2006. *Bank dan Lembaga*

Yuwika Emi Rahayu Anwar. 2003.
*Penilaian Efektivitas Sistem
Pengendalian Intern Fungsi
Kredit dan Penagihan Piutang
pada PT. Pangan Lestari
Denpasar*. Skripsi Sarjana
Jurusan Akuntansi Pada
Fakultas Ekonomi-Program
Ekstensi Universitas Udayana.
Denpasar.